

STRATEGI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT *LIKAT TELO* DALAM PENDIDIKAN FORMAL DI DESA ILE PADUNG

Veronika Boleng Kelen¹, Eusabius Separera Niron², Stephanie Perdana Ayu Lawalu³, Elisabeth D. M. Welin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email: veronikakelen5@gmail.com

Abstrak

Nilai-nilai adat Tiga Tungku (*Likat Telo*) merupakan sistem sosial yang mengatur relasi kekerabatan dan harmoni sosial masyarakat Lamaholot di Desa Ile Padung melalui prinsip *Opu Belake* dan *Muro* (ikan ayam). Namun, dinamika modernisasi dan perubahan sosial berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat tersebut. Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam mentransmisikan nilai budaya lokal melalui mekanisme pendidikan yang tidak hanya bersifat kurikuler, tetapi juga kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku dalam pendidikan formal di Desa Ile Padung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi dan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. *Hidden curriculum* diposisikan sebagai strategi implementatif dalam internalisasi nilai adat melalui budaya sekolah, keteladanan guru, dan interaksi sosial peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai adat Tiga Tungku berlangsung secara implisit dan berkelanjutan melalui praktik pendidikan sehari-hari di sekolah. Keberhasilan strategi implementasi sangat ditentukan oleh konsistensi komunikasi nilai budaya, komitmen pelaksana, serta dukungan kelembagaan sekolah dan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan sekolah berbasis budaya lokal sebagai upaya pelestarian nilai-nilai adat dalam pendidikan formal.

Kata Kunci: *Nilai Adat Tiga Tungku, Pendidikan Formal, Implementasi Kebijakan.*

Abstract

The traditional values of Tiga Tungku (Likat Telo) form a social system regulating kinship and social harmony in the Lamaholot community of Ile Padung Village through the principles of Opu-Belake and Muro (chicken fish). However, modernization and social change have reduced younger generations' understanding of these indigenous values. Formal education has a strategic role in transmitting local cultural values through both curricular and cultural educational mechanisms. This study aims to analyze the implementation strategy of Tiga Tungku traditional values in formal education in Ile Padung Village. Using a qualitative ethnographic approach, the study applies George C. Edwards III's policy implementation model, which emphasizes communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The hidden curriculum functions as an implementation strategy for internalizing traditional values through school culture, teacher role models, and student social interactions. The findings reveal that the implementation of Tiga Tungku values occurs implicitly and continuously through daily educational practices. Successful implementation depends on consistent communication of cultural values, implementer commitment, and support from schools and indigenous communities. The study recommends strengthening local culture-based school policies to preserve indigenous values in formal education.

Keywords: *Three Stoves Indigenous Values, Formal Education, Policy Implementation.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Lamaholot di Desa Ile Padung memiliki sistem sosial berbasis adat yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan bersama (Wutun, Tokan, and Servatius 2025). Salah satu sistem adat yang menjadi fondasi utama kehidupan sosial masyarakat adalah budaya perkawinan Tiga Tungku (Likat Telo). Sistem ini mengatur relasi antar rumpun suku melalui konsep *Opu Belake* sebagai relasi pemberi dan penerima perempuan serta prinsip Muro (ikan ayam) yang menentukan pola perkawinan antar suku secara bergiliran. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga solidaritas, mencegah konflik, dan memperkuat identitas kolektif Masyarakat (Kelen, Indriyati, Ethelbert 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi dan perubahan sosial membawa dampak signifikan terhadap keberlanjutan nilai-nilai adat (Irawan, Damanik, and Marpaung 2025). Generasi muda cenderung mengalami penurunan pemahaman terhadap makna dan fungsi sosial adat Tiga Tungku (Luthfianda and Sufriadi 2024). Jika kondisi ini terus berlangsung, maka nilai-nilai adat berpotensi tergerus dan kehilangan relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat (Mardiah and Supriadi 2025).

Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam proses transmisi nilai budaya kepada generasi muda (Alhamdany et al. 2025). Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, sikap, dan identitas sosial peserta didik (Umar and Masnawati 2024). Dalam konteks ini, internalisasi nilai adat tidak selalu harus dilakukan melalui kurikulum formal, tetapi dapat berlangsung melalui mekanisme pendidikan yang bersifat implisit atau dikenal sebagai *hidden curriculum* (Khanifah and Mudzakkir 2024). *Hidden curriculum* memungkinkan nilai budaya ditanamkan melalui budaya sekolah, keteladanan guru, interaksi sosial, serta kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan Pendidikan (Naufal Gustrianto, Sutarto, and Rini 2025).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian ini, namun juga mempunyai perbedaan mengenai objek yang akan diteliti, diantaranya Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati et al. 2025) dimana menyoroti peran *hidden curriculum* dalam memperkuat nilai-nilai kearifan lokal melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Fokus utamanya pada pembentukan karakter religius dan budaya sekolah berbasis nilai lokal. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada nilai-nilai adat “Tiga Tungku” di Desa Ile Padung, dengan ruang lingkup sosial-budaya lamaholot dan pendekatan integrasi nilai adat dalam pendidikan formal umum, bukan hanya pada mata pelajaran agama. Penelitian kedua oleh (SASTRA 2024) yang membahas bagaimana nilai-nilai kearifan lokal diinternalisasi dalam mata pelajaran PKN untuk membentuk karakter dan nasionalisme siswa. Penelitiannya menitikberatkan pada metode pembelajaran kontekstual. Kemudian, penelitian ketiga oleh (Pertiwi, Siregar, and Maysara 2025) yang mengkaji penerapan nilai-nilai kearifan lokal di Lembaga PAUD nonformal untuk membangun identitas budaya anak sejak dini. Fokusnya pada pendidikan usia dini dan pembelajaran kontekstual berbasis budaya. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti pendidikan formal tingkat dasar menengah, dengan fokus mekanisme *hidden curriculum* sebagai strategi implementasi nilai adat “Tiga Tungku”.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan *hidden curriculum* efektif dalam memperkuat nilai kearifan lokal dan karakter peserta didik. Namun, kajian yang secara spesifik menelaah strategi implementasi nilai adat tertentu dalam konteks pendidikan formal berbasis budaya lokal masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji strategi implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku dalam

pendidikan formal di Desa Ile Padung, dengan menempatkan *hidden curriculum* sebagai pendekatan implementatif yang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku dalam pendidikan formal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kearifan lokal (*local wisdom*) secara konseptual dimaknai sebagai pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat setempat dalam menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan mereka (Njatrijani, 2018). Nilai-nilai dalam kearifan lokal bersifat turun-temurun, telah melembaga secara tradisional, dan berfungsi sebagai pedoman etis-sosial yang mengatur relasi antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu wilayah adat (Njatrijani, 2018). Dalam konteks masyarakat Lamaholot di Desa Ile Padung, nilai adat Tiga Tungku (Likat Telo) merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang beroperasi sebagai sistem sosial normatif, mengatur pola relasi kekerabatan melalui prinsip Opu-Belake dan Muro. Kerangka konseptual ini menjadi dasar untuk memahami mengapa nilai adat semacam ini memerlukan mekanisme transmisi lintas generasi yang terlembaga, termasuk melalui institusi pendidikan formal.

Istilah *hidden curriculum* pertama kali diperkenalkan oleh Jackson (1968) dalam karyanya *Life in Classrooms* untuk menggambarkan norma, nilai, dan ekspektasi yang tidak diajarkan secara eksplisit dalam kurikulum resmi, tetapi tetap dipelajari peserta didik melalui rutinitas, interaksi sosial, dan budaya sekolah sehari-hari. Jackson (1968) menegaskan bahwa keberhasilan peserta didik di sekolah bergantung pada penguasaan atas kurikulum resmi sekaligus kurikulum tersembunyi tersebut. Konsep ini kemudian dikembangkan Giroux dan Penna (1979) yang memaknai *hidden curriculum* sebagai norma, nilai, dan keyakinan yang tidak dinyatakan secara tertulis, namun ditransmisikan kepada siswa melalui struktur makna yang melekat, baik dalam muatan kurikulum formal maupun praktik keseharian di sekolah. Dalam penelitian ini, *hidden curriculum* digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana nilai adat Tiga Tungku diinternalisasikan melalui teguran lisan, keteladanan guru, dan pembiasaan sikap, meskipun belum terinstitusionalisasi dalam kurikulum resmi sekolah.

Implementasi kebijakan didefinisikan Edward III (1980) sebagai tahapan yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuannya setelah dirumuskan. Edward III (1980) mengemukakan empat variabel yang saling memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi menyangkut kejelasan dan konsistensi penyampaian kebijakan kepada pelaksana maupun sasaran kebijakan; sumber daya mencakup ketersediaan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung; disposisi merujuk pada komitmen dan sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur kerja standar dan pola pembagian tanggung jawab dalam organisasi pelaksana (Edward III, 1980). Keempat dimensi tersebut bersifat saling terkait dan telah digunakan secara luas untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan berbasis budaya, sebagaimana ditunjukkan pada bagian penelitian terdahulu berikut. Model inilah yang digunakan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk membedah strategi implementasi nilai adat Tiga Tungku di lingkungan pendidikan formal Desa Ile Padung.

Berlandaskan ketiga kerangka teori tersebut, kajian empiris mengenai nilai-nilai adat sebagai sistem sosial yang mengatur relasi kekerabatan dan menjaga harmoni kolektif telah banyak didokumentasikan dalam konteks masyarakat Lamaholot maupun kelompok etnis lain di Nusa Tenggara Timur. Poli, Aliffiati, dan Wiasti (2021) mengkaji sistem perkawinan adat Lamaholot di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, secara antropologis

dan menunjukkan bahwa pola perkawinan bergiliran antarsuku berfungsi menjaga keseimbangan relasi kekerabatan sekaligus mencegah konflik sosial. Temuan serupa dikemukakan Kelen dkk. (2025) yang menegaskan peran pemerintah desa dalam pelestarian nilai budaya perkawinan Tiga Tungku pada Masyarakat Adat Leworahang, serta Wutun, Tokan, dan Servatius (2025) yang mengungkap nilai kearifan lokal Welin Ela Bala dalam tradisi perkawinan di Kabupaten Lembata sebagai instrumen pengikat solidaritas antarkelompok. Ketiga penelitian ini menegaskan bahwa sistem perkawinan adat pada masyarakat Lamaholot, termasuk Tiga Tungku (Likat Telo), bukan sekadar ritus seremonial, melainkan mekanisme sosial yang mengatur hak dan kewajiban kolektif serta memperkuat identitas budaya.

Namun demikian, sejumlah studi memperlihatkan bahwa keberlanjutan nilai-nilai adat tersebut kini menghadapi tekanan yang tidak ringan akibat modernisasi dan perubahan sosial. Irawan, Damanik, dan Marpaung (2025) menunjukkan bahwa hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia mengalami pergeseran fungsi di tengah dinamika hukum modern, sementara Luthfianda dan Sufriadi (2024) mendapati bahwa peran generasi muda dalam melestarikan adat istiadat cenderung menurun seiring lunturnya keterlibatan mereka dalam praktik-praktik adat. Mardiah dan Supriadi (2025), melalui analisis literatur terhadap tradisi Melayu Natuna, menambahkan bahwa kearifan lokal berisiko kehilangan relevansi apabila tidak diwariskan secara sistematis kepada generasi penerus. Pola yang sama teridentifikasi dalam konteks Desa Ile Padung, tempat generasi muda mengalami penurunan pemahaman terhadap makna dan fungsi sosial adat Tiga Tungku sebagai imbas modernisasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara adat sebagai sistem nilai normatif dan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memaknai dan mempraktikkannya secara konsisten.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi untuk memahami secara mendalam proses sosial-budaya dalam implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku di lingkungan pendidikan formal. Penelitian dilakukan di SD Katolik Leworahang dan SMPS St. Antonius Padua Leworahang, Desa Ile Padung, Kabupaten Flores Timur. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, tokoh adat, orang tua siswa, dan perwakilan pemerintah desa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara terbuka untuk melihat praktik budaya dalam kegiatan sekolah, sedangkan wawancara dilakukan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan guna menggali pandangan dan pengalaman para informan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat temuan primer dan diperoleh dari dokumen kebijakan sekolah, arsip desa, literatur akademik, serta peraturan adat dan Pendidikan yang relevan dengan pelestarian budaya lamaholot. Semua data yang diperoleh dicatat dalam bentuk tulisan, rekaman, dan dokumentasi foto untuk kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan Teknik (Rukajat 2018; Miles, Huberman, and Saldaña 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai Adat Tiga Tungku dalam Pendidikan Formal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku (Likat Telo) dalam pendidikan formal di Desa Ile Padung belum terinstitusionalisasi secara formal dalam kurikulum sekolah, baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah pertama.

Namun demikian, nilai-nilai adat tersebut tetap hadir dan dijalankan secara implisit melalui praktik pendidikan sehari-hari.

Guru-guru di SDK Leworahang dan SMPS St. Antonius Padua menyampaikan bahwa nilai adat lebih banyak ditanamkan melalui teguran lisan, nasihat moral, pembiasaan sikap, serta interaksi sosial antara guru dan siswa, terutama terkait tata krama, tegur sapa, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, serta relasi pergaulan remaja. Praktik ini menunjukkan bahwa sekolah menjalankan fungsi transmisi nilai budaya melalui mekanisme *hidden curriculum*, yakni nilai yang tidak tertulis dalam kurikulum formal tetapi dipelajari melalui budaya sekolah dan keteladanan pendidik.

Di sisi lain, guru-guru juga menegaskan bahwa praktik adat di masyarakat yang semakin longgar dan tidak konsisten menyebabkan sekolah berada pada posisi dilematis. Sekolah diharapkan berperan dalam pencegahan pelanggaran adat, tetapi tidak memiliki legitimasi normatif yang kuat ketika aturan adat sendiri tidak ditegakkan secara konsisten di masyarakat.

2. Strategi Implementasi Nilai Adat Berdasarkan Model George C. Edwards III

Teori implementasi Edward III adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

a. Komunikasi

Aspek komunikasi merupakan faktor paling krusial sekaligus paling bermasalah dalam implementasi nilai adat Tiga Tungku di sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum terdapat kesepakatan nilai adat yang baku antara sekolah, lembaga adat, dan pemerintah desa. Akibatnya, komunikasi nilai adat kepada siswa dilakukan secara parsial dan bergantung pada inisiatif masing-masing guru.

Guru SDK Leworahang menyampaikan bahwa nilai adat hanya disampaikan dalam bentuk tata krama dasar dan etika pergaulan. Materi yang berkaitan langsung dengan kawin-mawin dan prinsip Muro belum diajarkan secara eksplisit karena dikhawatirkan bertentangan dengan praktik adat yang telah terjadi di masyarakat dan berpotensi memicu konflik dengan orang tua (Informan G1, SDK Leworahang).

Di tingkat SMP, beberapa guru menyampaikan bahwa ketika nilai adat disampaikan di kelas, siswa sering menunjukkan kebingungan karena tidak memperoleh penguatan nilai yang sama di lingkungan keluarga. Kondisi ini mencerminkan terputusnya rantai komunikasi nilai antara keluarga, masyarakat, dan sekolah (Informan G6, SMPS St. Antonius Padua). Dengan demikian, komunikasi nilai adat di sekolah lebih efektif berlangsung melalui *hidden curriculum*, seperti teguran terhadap perilaku pacaran yang tidak sesuai prinsip Muro, pembiasaan 5-S, serta nasihat moral singkat dalam kegiatan belajar mengajar.

b. Sumber Daya

Dari sisi sumber daya, penelitian menemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia relatif memadai, karena sebagian besar guru merupakan bagian dari komunitas adat dan memiliki pemahaman kultural tentang nilai Tiga Tungku. Namun, keterbatasan utama terletak pada ketiadaan sumber belajar tertulis yang terstandar.

Guru-guru di kedua sekolah secara konsisten mengusulkan perlunya penyusunan modul pembelajaran adat Tiga Tungku yang kontekstual dan disepakati bersama oleh sekolah, lembaga adat, dan pemerintah desa. Modul tersebut dipandang penting sebagai rujukan resmi agar guru tidak menyampaikan nilai adat berdasarkan interpretasi personal semata (Informan G4, SMPS St. Antonius Padua).

Selain keterbatasan sumber belajar tertulis yang kontekstual, penelitian ini juga menemukan adanya dinamika kebijakan terbaru dari pemerintah daerah terkait integrasi kearifan lokal dalam mata pelajaran muatan lokal. Guru-guru di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan agar sekolah mengajarkan kearifan lokal sebagai bagian dari muatan lokal.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadapi kendala substansial di tingkat sekolah. Guru-guru menyatakan bahwa modul muatan lokal yang disediakan belum kontekstual dengan latar budaya dan kebutuhan sosial peserta didik, khususnya di Desa Ile Padung. Salah satu contoh yang paling sering disoroti adalah materi muatan lokal tentang budidaya perikanan lokal, yang dinilai kurang relevan untuk diajarkan di tingkat sekolah menengah pertama karena tidak sesuai dengan kondisi budaya, dan pengalaman hidup sebagian besar siswa (Informan G5, SMPS St. Antonius Padua).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan daerah dan realitas sekolah, di mana muatan lokal dipahami secara generik dan belum berbasis pada kekhasan budaya lokal masyarakat Lamaholot, khususnya nilai adat Tiga Tungku. Akibatnya, muatan lokal belum berfungsi optimal sebagai instrumen pelestarian nilai adat dan budaya setempat.

c. Disposisi (Sikap) Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam implementasi nilai adat menunjukkan komitmen moral yang kuat dari para guru, meskipun belum didukung kebijakan formal. Guru secara aktif menegur perilaku siswa yang dianggap menyimpang, menanamkan nilai saling menghargai, serta membiasakan sikap empati dan tolong-menolong.

Beberapa guru menyampaikan keprihatinan terhadap menurunnya tata krama, penggunaan bahasa yang tidak santun, serta rendahnya kepedulian sosial siswa. Oleh karena itu, guru berupaya menanamkan nilai kebajikan universal yang berakar pada adat Lamaholot melalui pembiasaan budaya 5-S, wejangan singkat sebelum pembelajaran, dan keteladanan sikap (Informan G7, SMPS St. Antonius Padua).

Temuan ini menunjukkan bahwa disposisi guru menjadi faktor kunci keberlangsungan implementasi nilai adat, terutama dalam konteks lemahnya dukungan struktural.

d. Struktur Birokrasi

Dari aspek struktur birokrasi, penelitian menemukan bahwa dukungan kelembagaan terhadap implementasi nilai adat masih lemah. Guru-guru menilai bahwa peraturan desa terkait adat sering kali tidak ditegakkan secara konsisten, bahkan dilanggar oleh aparat desa sendiri, sehingga kehilangan legitimasi moral (Informan G9, SMPS St. Antonius Padua).

Ketiadaan sanksi adat yang tegas dan pengawalan yang berkelanjutan menyebabkan sekolah tidak memiliki dasar normatif yang kuat untuk menjadikan nilai adat sebagai acuan formal dalam pendidikan. Akibatnya, implementasi nilai adat di sekolah bergantung pada inisiatif individual guru, bukan pada sistem birokrasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Benturan kebijakan juga ditemukan antara tuntutan kurikulum nasional dan upaya pelestarian budaya lokal di sekolah. Guru-guru di tingkat SMPS menyampaikan bahwa kurikulum nasional saat ini menghendaki penguatan kompetensi abad ke-21, termasuk pengenalan artificial intelligence (AI), literasi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Meskipun kebijakan tersebut penting untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, dalam praktiknya hal ini membatasi ruang gerak sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan budaya lokal. Pembagian mata pelajaran, beban jam mengajar, serta target capaian kurikulum telah disesuaikan secara ketat, sehingga guru mengalami kesulitan untuk memasukkan materi nilai adat Tiga Tungku secara eksplisit ke dalam pembelajaran di kelas (Informan G8, SMPS St. Antonius Padua). Situasi ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi pendidikan cenderung lebih menekankan pemenuhan target kurikulum nasional dibandingkan penguatan identitas budaya lokal. Akibatnya, pendidikan

nilai adat berada pada posisi marginal dan bergantung pada kreativitas serta inisiatif individual guru.

3. Hidden Curriculum sebagai Strategi Implementasi Nilai Adat

Dalam kondisi keterbatasan kebijakan formal dan lemahnya struktur birokrasi, *hidden curriculum* muncul sebagai strategi implementasi yang paling realistis dan efektif. Nilai-nilai adat Tiga Tungku diinternalisasikan melalui:

- a. Pembiasaan sikap saling menghargai dan tegur sapa (5-S),
- b. Teguran spontan terhadap perilaku menyimpang,
- c. Keteladanan guru dalam berbahasa dan bersikap,
- d. Penyisipan nilai adat dalam mata pelajaran agama, IPS, dan muatan lokal secara tidak langsung.

Strategi ini memungkinkan sekolah tetap menjalankan fungsi edukatif budaya tanpa harus berhadapan langsung dengan konflik normatif di masyarakat. Dalam merespons keterbatasan kurikulum formal dan benturan kebijakan tersebut, guru-guru menyampaikan adanya rencana strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai adat Tiga Tungku melalui kegiatan kokurikuler dan kebudayaan sekolah, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama.

Kegiatan kokurikuler dipandang sebagai ruang yang lebih fleksibel dan kontekstual untuk menyampaikan nilai adat tanpa terikat secara ketat oleh struktur mata pelajaran dan jam mengajar. Guru merencanakan integrasi nilai adat Tiga Tungku melalui kegiatan seperti pembinaan karakter, kegiatan keagamaan, diskusi budaya, serta kegiatan kebudayaan sekolah lainnya yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat setempat (Informan G6, SMPS St. Antonius Padua).

Strategi ini memperkuat temuan bahwa *hidden curriculum* tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga diperluas melalui aktivitas kokurikuler sebagai ruang alternatif pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, sekolah berupaya menyeimbangkan tuntutan kurikulum nasional berbasis teknologi dengan kebutuhan pelestarian nilai adat yang berakar pada konteks sosial budaya masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi nilai adat Tiga Tungku bersifat adaptif, dengan memanfaatkan ruang-ruang non-formal dalam sistem pendidikan untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya lokal di tengah tekanan modernisasi dan standarisasi Pendidikan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku (*Likat Telo*) dalam pendidikan formal di Desa Ile Padung belum terinstitusionalisasi secara formal ke dalam kurikulum sekolah, baik di jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut tetap hidup dan ditransmisikan secara konsisten melalui mekanisme *hidden curriculum*, yakni melalui teguran lisan, nasihat moral, pembiasaan sikap 5-S, keteladanan guru, serta interaksi sosial sehari-hari di lingkungan sekolah. Temuan ini menegaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan kebijakan formal, jalur implisit pendidikan justru menjadi strategi paling realistis dan adaptif untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya lokal di tengah tekanan modernisasi.

Ditinjau dari keempat dimensi model implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini menemukan pola implementasi yang timpang antardimensi. Aspek komunikasi teridentifikasi sebagai titik lemah utama, ditandai dengan belum adanya kesepakatan nilai adat yang baku antara sekolah, lembaga adat, dan pemerintah desa, sehingga penyampaian nilai kepada siswa berlangsung secara parsial dan bergantung pada inisiatif individual guru, serta terputusnya penguatan nilai antara keluarga dan sekolah. Dari sisi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia relatif memadai karena sebagian besar guru merupakan

bagian dari komunitas adat, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan modul pembelajaran tertulis yang terstandar dan kontekstual, sementara kebijakan muatan lokal dari pemerintah daerah belum selaras dengan kekhasan budaya Lamaholot. Disposisi pelaksana, sebaliknya, menjadi faktor paling kuat dan konsisten: komitmen moral guru sebagai agen budaya terbukti menjadi penopang utama keberlangsungan transmisi nilai adat meskipun tanpa dukungan struktural yang memadai. Adapun struktur birokrasi menunjukkan kelemahan paling signifikan, tercermin dari lemahnya penegakan aturan adat di tingkat masyarakat serta benturan antara tuntutan kurikulum nasional berbasis kompetensi abad ke-21 dengan ruang gerak sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan budaya lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi nilai-nilai adat Tiga Tungku di Desa Ile Padung bersifat implisit, adaptif, dan sangat bergantung pada disposisi guru sebagai agen budaya, di tengah lemahnya dukungan komunikasi, sumber daya tertulis, dan struktur birokrasi formal. Penguatan kelembagaan melalui penyusunan kesepakatan nilai adat yang baku, penyediaan modul pembelajaran kontekstual, serta pengakuan formal terhadap *hidden curriculum* sebagai strategi pendidikan berbasis budaya lokal menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan transmisi nilai adat Tiga Tungku pada generasi mendatang. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari strategi implementasi ini terhadap pembentukan karakter dan perilaku sosial peserta didik, guna memperkuat basis empiris bagi perumusan kebijakan pendidikan berbasis budaya lokal yang lebih terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Manuputty, F., Litaay, S. C. H., & Makaruku, N. D. (2024). Nilai-nilai kearifan lokal Maluku dalam *hidden curriculum*: Strategi membangun perdamaian dan toleransi di sekolah dasar. *Journal of Education Research*, 5(4), 5071–5083.
- Alhamdany, M. S., Maulana, A. B., Afnanda, M., & Zulkifli, M. (2025). Pelestarian Budaya Banjar dalam Kurikulum Merdeka: Strategi Integrasi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan Nonformal. *Al-Dirosah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(02).
- Gustrianto, M. N., Sutarto, S., & Rini, R. (2025). *Pembentukan Karakter Kejujuran dan Disiplin Siswa Melalui Hidden Curriculum Pada Pembelajaran PAI (Studi di SMPN 4 Rejang Lebong)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Irawan, M., Damanik, M. J., & Marpaung, R. (2025). Proses Perbuatan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 64-70.
- Kelen, V. B., Indriyati, I., Ethelbert, Y. K., & Mambo, S. O. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Pelestarian Nilai Budaya Perkawinan Tiga Tungku Masyarakat Adat Leworahang. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 4(4), 1–7.
- Khanifah, A., & Mudzakkir, M. (2024). Hidden Curriculum Buku Pelajaran Sosiologi: Transfer Ideologi Antar Generasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6), 1887-1906.
- Luthfianda, A., & Sufriadi, D. (2024). Peran Pemuda Dalam Melestarikan Adat Istiadat. *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 1-8.
- Mardiah, A., & Supriadi, D. (2025). Kearifan Lokal Dalam Tradisi Melayu Natuna: Analisis Literatur Terhadap Nilai-Nilai Sosial Budaya. *Jurnal Tapak Melayu*, 3(01), 93–102.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Nurhayati, R., Nur, M. J., Suwito, A., Ningsih, D. A., Ramadani, N., & Jannah, M. (2025). Hidden Curriculum Sebagai Penguatan Budaya Kearifan Lokal dalam Pembelajaran PAI di SMPN 7 Sinjai. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 17(1), 402-

409.

- Pertiwi, F., Siregar, H., & Maysara, S. R. (2025). Implementasi pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal di PAUD-Nonformal: Studi fenomenologi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(6), 2691-2704.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Sastra, A. T. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan*, 8(1), 171–79.
- Umar, H., & Masnawati, E. (2024). Peran Lingkungan Sekolah Dalam Pembentukan Identitas Remaja. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 191–204.
- Wutun, H. Y. L., Tokan, F. B., & Servatius, R. (2025). Nilai Kearifan Lokal Welin Ela Bala dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 227-242.